



SIDAK MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DINILAI 'LANGKAH' GUBERNUR

Pengelolaan Belum Optimal, Tumpukan Sampah di Depo Hal Wajar

YOGYA (KR) - Hingga saat ini pengelolaan sampah di Kota Yogya memang belum berjalan optimal. Selain keterbatasan lahan untuk mengolah sampah, penggunaan teknologi juga masih berproses. Sehingga terjadinya penumpukan sampah di depo dinilai hal wajar lantaran fungsinya sebagai transit poin.

Penjabat (P) Walikota Yogya Sugeng Purwanto, mengungkapkan dari total 200 ton sampah per hari yang dihasilkan di Kota Yogya, baru sekitar 160 ton yang berhasil terkelola. "Sehingga kalau di depo masih ada tumpukan itu sesuatu yang wajar, karena depo adalah transit poin," ungkapnya, Selasa (19/11).

Pengelolaan sampah di Kota Yogya sejauh ini memanfaatkan empat lokasi. Masing-masing di TPA Piyungan, TPS 3R Nitikan, TPST Kranon dan TPS Karangmiri. Sampah tersebut diolah menjadi bahan bakar alternatif berupa RDF kemudian dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Akan tetapi hanya di tiga

lokasi, selain TPA Piyungan yang setiap hari difungsikan. Selain itu pengelolaannya juga masih di bawah kapasitas lantaran masih terus dilakukan evaluasi.

Selain itu, penggunaan teknologi berupa insinerator juga masih berproses. Melalui APBD perubahan tahun ini Pemkot Yogya berhasil membeli dua alat insinerator dengan kapasitas besar. Hanya, keduanya belum bisa langsung difungsikan karena masih perlu dilakukan penyesuaian. Begitu pula dari aspek penanganan sektor hulu atau rumah tangga di wilayah selaku produsen sampah. Keberadaan bank sampah serta biopori sekaligus pembinaan kepada ma-

syarakat tidak pernah berhenti dilakukan. "Jadi pengelolaan sudah berlapis mulai dari hulu hingga hilir. Tetapi memang belum optimal, namun semua itu konsepnya ialah mengelola," imbuh Sugeng.

Terkait inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Hanif Faisol Nurofiq pada Senin (18/11), menurut Sugeng pihaknya tidak mempersoalkan. Akan tetapi karena tidak ada informasi sebelumnya maka kondisi faktual di lapangan akhirnya tidak terinformasikan. "Kami tidak apa-apa. Akan kami jawab dengan fakta di lapangan. Kemarin (sidak) kan tidak ada info ke kami," tandasnya.

Begitu juga terkait kelakar MenLH yang akan mencari tersangka atas pengelolaan sampah di Kota Yogya, Sugeng belum mengetahui langkah hukum seperti apa yang akan ditempuh. Apakah

terkait Pemkot Yogya yang dinilai tidak mampu mengelola sampah atau persoalan lain. Namun demikian harapannya ada atensi dari pusat terkait solusi yang belum bisa ditangani oleh daerah. Hingga saat ini bantuan dari pemerintah pusat masih belum ada. Seluruh kebutuhan dalam pengelolaan sampah masih mengandalkan APBD Kota Yogya. "Semoga beliau bisa memahami kondisi di Kota Yogya. Pengelolaan di dekat perumahan elit, tengah kampung dan tidak ada demo, itu bagi kami sudah luar biasa. Tetapi kalau optimal, jelas kami belum bisa. Meskipun tanpa itu (bantuan pusat) kami sudah ada progres mulai dari pengelolaan sampai insinerator dan ini juga masih berproses," jelas Sugeng.

Dirinya pun berharap tidak ada kepentingan politik di tengah sidak MenLH kelmarin. Pasalnya pada kondisi dan situasi saat ini seharusnya semua pihak mampu menjaga marwah bersama.

Sementara sidak yang dilakukan oleh MenLH kemarin dinilai banyak pihak 'melangkah' Gubernur DIY. Hal ini karena desentralisasi sampah merupakan program Gubernur DIY yang diberlakukan per Januari 2024. Seharusnya pihak kementerian melakukan komunikasi terlebih dahulu supaya selama sidak bisa didampingi oleh Gubernur atau pejabat terkait. Hal ini supaya ada penjelasan sekaligus informasi yang didapat tidak satu arah. Apalagi perjalanan desentralisasi pengelolaan sampah hingga saat ini juga masih terus dievaluasi. Dibanding pengelolaan di kabupaten lain, Kota Yogya memang belum optimal lantaran berbagai kondisi. Anggota DPRD Kota Yogya Nurcahyo Nugroho pun berharap, Pemkot Yogya segera meminta waktu untuk melakukan audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Terutama berkaitan penjelasan dari Pemkot perihal peta jalan pengelolaan sampah di Kota Yogya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005